



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

2025



JL. Margantara No. 460 Tanjung
Tlp : 637211

<http://dinhub.banyumaskab.go.id/>





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025, yang mana telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terdapat 4 indikator kinerja yang harus dicapai di akhir tahun 2025.

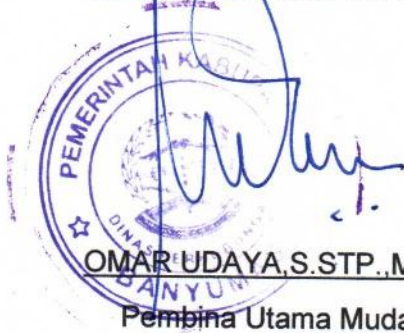
Realisasi kinerja tahun 2025 sampai dengan triwulan IV, keempat indikator kinerja Dinas Perhubungan telah mencapai target seluruhnya. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tetap akan berusaha dan bertanggung jawab untuk lebih meningkatkan lagi capaian kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Perhubungan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.



Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 akan bermanfaat bagi peningkatan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Januari 2026

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS**



OMAR UDAYA, S.STP., M.SI
Pembina Utama Muda

NIP. 19770104 199603 1 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 menyajikan pengukuran hasil kinerja pencapaian sasaran yang diarahkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sesuai dengan target yang telah menjadi komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Hasil pengukuran kinerja pada masing-masing tujuan dan indikator tujuan telah dianalisis, yaitu dengan membandingkan realisasi kinerja berdasarkan target kinerja dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun lalu. Laporan ini menyajikan pula uraian program serta beserta anggarannya pada masing-masing tujuan, realisasi anggaran yang mendukung realisasi tujuan, dan strategi yang diambil Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam mencapai tujuan atau indikator kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran, penyelenggaraan pemerintahan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 telah tercapai dengan capaian 100 %. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran kinerja yang dapat dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas 2025. Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa 4 (empat) Indikator Kinerja Utama tercapai 100 % dengan kategori "Tercapai";

Dari 4 (empat) indikator kinerja, telah tercapai dari perencanaan yang ditargetkan. Ada 1 indikator kinerja yang melebihi 100 % yakni " V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota" mencapai 135.14 %.

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan 1 (satu) indikator yakni "Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota" dengan target 0,785 dan capaiannya 0,785 dengan tingkat kecapaiannya 100%. Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas memiliki 3 (Tiga) Indikator yakni sebagai berikut :

1. 'Indeks Konektivitas angkutan jalan" dengan target 0,8 dan capaian 0,8 dengan tingkat kecapaiannya 100% ;



2. Indeks Konektivitas Angkutan Sungai dengan target 0,75 dan capaiannya 0,75 dengan tingkat capaiannya 100 %;
3. V/C Ratio di jalan Kabupaten/Kota dengan target 0,74 dan capainnya 0,48 dengan tingkat capaiannya 135,14 %

Dengan melihat diatas menunjukan indikator telah efisien karena indikator kinerja dapat dicapai sebesar 100% atau lebih, dan presentase penyerapan anggaran kurang dari 100%. Adapun Dimana capaian anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 mencapai 94,5 %, yakni dengan pagu anggaran Rp. 61.048.817.844 terealisasi sebesar Rp. 58.773.509.861

Adapun hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 mendapat predikat "A" dengan nilai 88,90. Selanjutnya rekomendasi yang disampaikan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas atas evaluasi penyelenggaraan SAKIP Tahun 2025, sampai dengan saat ini masih terus ditindaklanjuti. Selain itu pada tahun 2025 juga telah direncanakan tindak lanjut perbaikan.

Akhirnya, semoga LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banyumas. Prestasi kinerja yang berhasil diraih merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas bersama *stakeholder* yang dibingkai semangat kebersamaan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Berbagai kekurangan yang ada, tentunya menjadi pemacu untuk memotivasi agar lebih bersemangat dalam bekerja dan berusaha demi menjadikan **Banyumas Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing, Serta Lestari**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

IKHTISAR EKSEKUTIF 4

DAFTAR ISI 6

DAFTAR TABEL 7

BAB I PENDAHULUAN **Error! Bookmark not defined.**

 A. Latar Belakang..... 8

 B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 9

 C. SUSUNAN ORGANISASI..... 10

 D. SUMBER DAYA APARATUR..... 14

 E. ISU STRATEGIS 15

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 14

 A. Rencana Strategis 14

 B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 27

 C. Rencana Anggaran Tahun 2025 28

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 29

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 29

 B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 31

 C. REALISASI ANGGARAN 49

 E. PRESTASI DINAS PERHUBUNGAN..... 51

BAB IV PENUTUP 53

 A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA 53

 B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS 54



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan tingkat Pendidikan..... 14

Tabel 1. 2 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan Golongan/Ruang..... 14

Tabel 2. 1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 26

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025.. 27

Tabel 2. 3 Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 28

Tabel 3. 1 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025..... 31

Tabel 3. 2 Pebandingan Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025..... 31

Tabel 3. 3 Pebandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 s.d 2025 32

Tabel 3. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 34

Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten 34

Tabel 3. 6 Efisiensi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas 37

Tabel 3. 7 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 38

Tabel 3. 8 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025..... 40

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025..... 41

Tabel 3. 10 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra 43

Tabel 3. 11 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten..... 44

Tabel 3. 12 Efisiensi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas 46

Tabel 3. 13 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025..... 47

Tabel 3. 14 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 49

Tabel 3. 15 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Per Sasaran Tahun 2025..... 49

Tabel 3. 16 Tingkat Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran 50

Tabel 3. 17 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu pimpinan daerah, dituntut untuk selalu melakukan pembenahan kinerja. Dengan Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banyumas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas



dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 79 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan, dan supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang meliputi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Penerbangan dan Perkeretaapian, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;



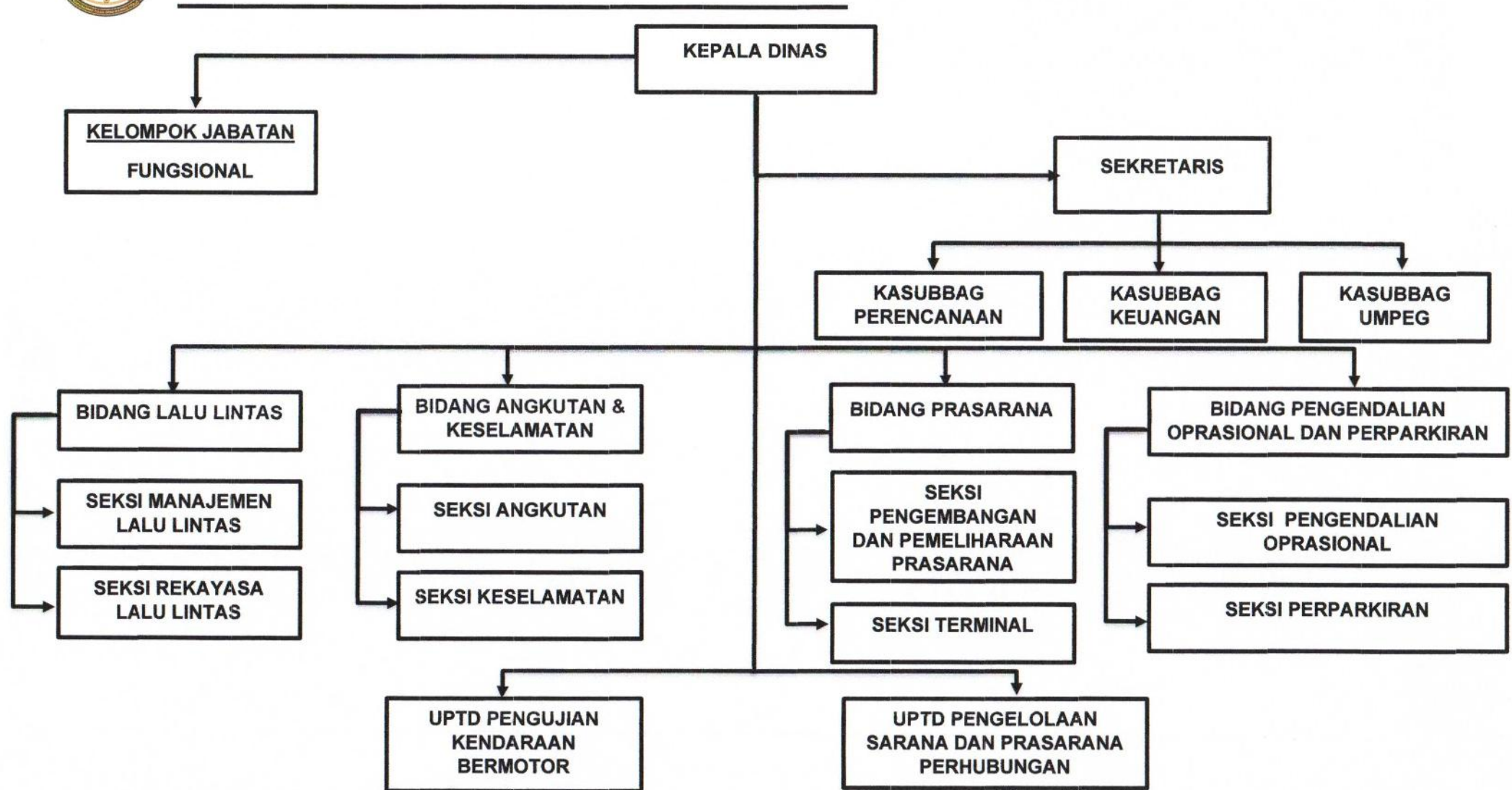
- c. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perpajakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. Evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, bidang lalu lintas, bidang lalu lintas, bidang angkutan dan keselamatan, bidang prasarana serta bidang pengendalian operasional dan perpajakan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. SUSUNAN ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :



Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas





D. SUMBER DAYA APARATUR

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang yang diemban, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas didukung oleh sejumlah pegawai yang tertanggal 31 Desember 2025 tercatat sebanyak 204 pegawai dengan rincian seperti tabel berikut:

Tabel 1. 1

Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS	Jumlah PPPK	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	7	0	7
2.	Sarjana (S1)	9	27	36
3.	Diploma (D4)	3	3	6
4.	Sarjana Muda (D3)	16	6	22
5.	Diploma (D2)	4	2	6
6.	SLTA	16	86	102
7.	SLTP	2	2	4
8.	SD	1	2	3
	Total	58	37	186

Tabel 1. 2

Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan Golongan/Ruang

Gol/Ruang PNS	Jumlah (Orang)	Gol/ Ruang PPPK	Jumlah (Orang)
IV/d		IX	7
IV/c	1	VII	2
IV/b	1	VI	2
IV/a	3	V	25
III/d	7	I	1
III/c	4		
III/b	5		



Gol/Ruang PNS	Jumlah (Orang)	Gol/ Ruang PPPK	Jumlah (Orang)
III/a	12		
II/d	3		
II/c	12		
II/b	5		
II/a	5		
I/d	-		
I/c	-		
I/b	-		
I/a	-		
Total	58		37

E. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan, yang terangkat berdasarkan kondisi faktual di lapangan, inventarisasi permasalahan-permasalahan kunci, evaluasi capaian kinerja dalam jangka waktu 5 tahun terakhir dan memperhatikan RPD Kabupaten Banyumas 2024-2026, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan untuk 5 tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya jumlah kendaraan wajib uji dalam wilayah Kabupaten Banyumas perlu diimbangi dengan kemampuan pelayanan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor. Memperhatikan ketentuan dalam SPM pelayanan 1 unit PKB maksimal 4.000 kendaraan, maka dengan jumlah wajib uji yang sudah lebih dari 10.000 unit kendaraan, perlu ditambah kapasitas jumlah kendaraan uji per hari dengan membangun Unit Pengujian Kendaraan Bermotor 2 line.
2. Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang pada persimpangan yang diatur dengan Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) di wilayah perkotaan Purwokerto, maka sudah saatnya mengembangkan sistem pengaturan yang semula manual menjadi menggunakan program ATCS (Area Traffic Control System).



3. Wilayah Kabupaten Banyumas sebagai jalur lintasan mobilitas antarprovinsi untuk angkutan barang dan orang, dengan memperhatikan jarak pada posisi titik lelah pengemudi untuk beristirahat, maka perlu dibangun rest area pada jalan provinsi/nasional di Kabupaten Banyumas.
4. Meningkatnya penggunaan mobil pribadi karena semakin menurunnya tingkat pelayanan angkutan umum yang cenderung mahal dan kurang memenuhi standar keselamatan yang memadai, maka untuk mendorong masyarakat kembali beralih menggunakan angkutan umum perlu pengembangan angkutan massal dengan sistem bus rapid transit di wilayah Kabupaten Banyumas.
5. Pengembangan industri di Kecamatan Ajibarang dengan dibangunnya pabrik semen, maka untuk mengurangi beban kerusakan jalan perlu pengangkutan barang menggunakan angkutan kereta api, sehingga diperlukan terminal angkutan barang/dry port di wilayah Kabupaten Banyumas.
6. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, maka guna menarik minat masyarakat dalam meningkatkan pemahaman keselamatan berlalu lintas perlu pembuatan Taman Edukasi Keselamatan Transportasi Darat.
7. Meningkatnya pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa dalam wilayah perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas parkir kendaraan berdampak pada penggunaan badan jalan sebagai area parkir, sehingga penyediaan fasilitas gedung atau taman khusus parkir menjadi kebutuhan dalam mobilitas pergerakan orang dan barang.
8. Untuk meningkatkan mobilitas orang pada simpul transportasi jalan serta melayani kebutuhan angkutan kota/pedesaan pada simpul terminal, diperlukan pembangunan Terminal Tipe C pada simpul yang memenuhi persyaratan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan dalam hal ini adalah Kabupaten Banyumas. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Banyumas terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten



Banyumas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan *stakeholder*.

Pada tahun 2025, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mengalami perubahan sejalan dengan evaluasi RPD Kabupaten Banyumas, yang kemudian dilakukan evaluasi terhadap Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026. Evaluasi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 mencakup penyempurnaan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, penyempurnaan indikator dan target kinerja, serta penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan daerah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Banyumas dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Banyumas yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera. Visi pembangunan dalam RPD Kabupaten Banyumas adalah: **BANYUMAS 2025 SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERDAYA SAING, SERTA LESTARI.**

b. Misi

Untuk mewujudkan Misi tersebut, Pimpinan Daerah meletakkan misi-misi yang mendukung visi. Kabupaten Banyumas menetapkan 4 (empat) misi, sebagai berikut :

- 1) Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Sejahtera.
- 2) Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Mandiri



3) Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing.

4) Membangun Daerah Kabupaten Banyumas yang Lestari.

Setiap OPD nantinya akan mengarah pada pencapaian unsur misi RPJPD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mengarah pada pencapaian unsur misi ke-3 pada RPJPD yaitu : **Membangun Masyarakat Kabupaten Banyumas yang Maju dan Berdaya Saing.**

c. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati Banyumas serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan berikut indikator dan target Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:



Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Tabel 2. 1 Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
				2022	2023	2025	2025	2026	
Meningkatkan Konektivitas Wilayah	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	$(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan Sungai, danau dan penyebrangan})$		0.7025	0.79	0.785	0.785	0.785	0.785



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah			
		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0.785	Formulasi : Rasio konektivitas kabupaten atau kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan Sungai,danau dan penyebrangan) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : LPPD Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
2.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Konektivitas Wilayah			
		Indeks konektivitas angkutan jalan	0.8	Formulasi : IK1 =Jumlah trayek yg dilayani pada kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
				Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Data Trayek Angkutan Jalan
		Indeks konektivitas angkutan sungai	0.75	Formulasi : $IK2 = \frac{\text{jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tsb} \times \text{bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut}}$ Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Data Trayek Angkutan Sungai
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.74	Formulasi : $\frac{\text{Volume}}{\text{Capacity}}$ Ratio di Jalan Kabupaten/Kota Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Survey Lalu Lintas

C. Rencana Anggaran Tahun 2025

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp 53.896.066.844 dan Belanja Modal sebesar Rp 7.152.751.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 3

Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.190.299.272	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 42.708.518.572	APBD,BANTUAN KEUANGAN KHUSUS, PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN
3	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 150.000.000	APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas, serta mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi Misi Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil



pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025, yang mana telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja dan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut:

- Tujuan terdiri dari 1 (satu) indikator;
- Sasaran 1 (satu) terdiri dari 3 (tiga) indikator;

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 024/12272/2021.

Hasil pengukuran atas indikator tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 3. 1

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Tujuan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
Tujuan 1						
Meningkatnya Konektivitas Wilayah						
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0.785	0.785	100%	Tercapai
Sasaran 1						
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah						
1	Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.75	0.75	100 %	Tercapai
2	Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.8	0.8	100%	Tercapai
3	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.48	135.14%	Tercapai

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka rata-rata capaian kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2025 adalah sebesar 108.79%.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Tujuan : **Meningkatnya Konektivitas Wilayah**

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator tujuan Meningkatkan Konektivitas Wilayah tahun 2025 ditampilkan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3. 2

Pebandingan Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0.785	0.785	100

Tahun 2025 menandai awal pelaksanaan Renstra 2025–2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menetapkan satu tujuan dengan satu indikator utama, yaitu "**Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota**". Indikator ini dihitung menggunakan rumus :

$$(IK1 \times \text{Bobot Angkutan Jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot Penyeberangan})$$



Data yang digunakan berasal dari trayek angkutan jalan dan angkutan sungai. Dalam perhitungan ini, IK1 merupakan indeks konektivitas angkutan jalan, sedangkan IK2 adalah indeks konektivitas angkutan sungai. Kabupaten Banyumas memiliki bobot angkutan jalan lebih tinggi dibandingkan angkutan sungai, dengan nilai *Bobot Angkutan Jalan* sebesar 0,7 dan *Bobot Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP)* sebesar 0,3. Dengan perhitungan: $(0,8 \times 0,7) + (0,75 \times 0,3) = 0,785$. Sehingga, indikator tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah mencapai target 100%.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan meningkatnya konektivitas wilayah tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3. 3

Pebandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0.827	0.7025	84.89
Tahun 2023				
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0.89	0.79	88.76
Tahun 2024				
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0.785	0.785	100
Tahun 2025				
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0.785	0.785	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Pada tahun 2022, capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk indikator *Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota* tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur konektivitas sungai, di mana hanya terdapat dua dermaga, sementara target yang ditetapkan adalah



tiga dermaga. Akibatnya, layanan angkutan sungai hanya mencakup satu trayek. Pembangunan Dermaga Kedunguter direncanakan menggunakan APBN, yang merupakan faktor eksternal di luar kendali daerah. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan perlu menyesuaikan indikator dengan mengecualikan faktor eksternal, mengingat pembangunan dermaga di Kabupaten Banyumas sangat bergantung pada APBN yang tidak selalu dapat dipastikan. Penyesuaian ini mencakup pengurangan target jumlah dermaga agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi yang ada.

Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melakukan peninjauan dan perhitungan ulang terhadap indikator capaian kinerja. Pada indikator *Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota*, terjadi perubahan perhitungan bobot angkutan jalan dan angkutan sungai. Jika pada tahun 2022 bobot angkutan jalan sebesar 0,8 dan angkutan sungai 0,5, setelah ditinjau oleh Kemendagri, perhitungan rasio konektivitas wilayah disesuaikan menjadi *Bobot Angkutan Jalan* 0,7 dan *Bobot Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (SDP)* 0,3. Selain itu, pada indikator *Indeks Angkutan Sungai*, terjadi perubahan pola layanan atau *rerouting* trayek. Jika pada tahun 2022 hanya terdapat satu trayek yang beroperasi, maka pada tahun 2023 jumlah trayek yang dilayani meningkat menjadi tiga. Perubahan ini mencerminkan upaya peningkatan konektivitas dan efisiensi layanan transportasi sungai di Kabupaten Banyumas.

Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menyelaraskan target dengan mempertimbangkan *rerouting* trayek angkutan sungai. Dengan penyesuaian tersebut, Dinas Perhubungan berhasil mencapai target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2025 telah memperhatikan evaluasi di tahun sebelumnya dan trayek juga sudah disesuaikan dengan keadaan lapangan sehingga pada tahun 2025 masih dapat mempertahankan capaian di tahun sebelumnya.



c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tujuan Meningkatnya Konektivitas Wilayah tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3. 4

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Nilai	0.785	0.785	100	0.635	100

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Dari Tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas apabila disandingkan dengan target renstra telah mencapai target Renstra.

d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota	0.785	0.631	0.43	0.7	0.93	0.79	0.36

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025



Capaian kinerja Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mencapai 0,785 dimana dengan capaian Kabupaten sekitar yang sama-sama memiliki angkutan sungai yakni Kabupaten Cilacap di rentan 0,79. Rasio Konektivitas wilayah pada dasarnya tidak ada standar nasional, angka yang dicantumkan pada tabel 3.4 merupakan hasil kinerja capaian tingkat Nasional.

- e. Penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

1. Adanya Dukungan kebijakan perencanaan yang memadai, Dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra, serta Perda RTRW menjadi dasar yang kuat dalam perencanaan program perhubungan. Keselarasan dengan kebijakan nasional juga mendukung pencapaian indikator kinerja;
2. Dengan terealisasinya pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan perlengkapan jalan, berkontribusi signifikan dalam meningkatkan rasio konektivitas wilayah serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat;
3. Pengembangan inovasi teknologi informasi, seperti SIMATRA dan SIMANDALA, membantu pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan kebijakan serta monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas;
4. Koordinasi lintas sektor yang efektif dengan perangkat daerah, Kepolisian, Satpol PP, dan pemangku kepentingan lainnya mendukung pelaksanaan manajemen lalu lintas, penataan parkir, serta penegakan peraturan lalu lintas;
5. Melakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala agar dapat mengidentifikasi capaian kinerja dan kendala Dinas Perhubungan serta bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, serta menjadi dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan;
6. Komitmen Kepala Dinas Perhubungan dan seluruh pegawai dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program



perhubungan turut mendorong tercapainya target indikator kinerja tahun 2025;

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target

Keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perhubungan, antara lain :

- 1) Kondisi terminal masih ditandai oleh kerusakan kios serta fasilitas umum, seperti kamar mandi, ruang tunggu, atap plafon, dan drainase yang belum berfungsi optimal. Sebagai upaya perbaikan, pada tahun 2025 dialokasikan anggaran untuk penataan drainase dan perbaikan jalan di area parkir, guna meningkatkan kenyamanan, keamanan pengguna, serta mendukung kelancaran operasional terminal.
 - 2) Ketersediaan perlengkapan jalan yang belum sepenuhnya optimal mendorong dilakukannya upaya peningkatan pada tahun 2025 melalui optimalisasi pemasangan perlengkapan jalan, seperti marka jalan, rambu lalu lintas, cermin tikungan, serta lampu lalu lintas (traffic light), guna meningkatkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
 - 3) Kondisi prasarana jalan yang belum sepenuhnya optimal mendorong dilakukannya upaya peningkatan pada tahun 2025 melalui optimalisasi ketersediaan prasarana jalan, antara lain pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), guna meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta kelancaran mobilitas masyarakat.
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :
- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 - 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga



menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

- 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
- 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3. 6

Efisiensi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Ahir (perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.950.279.307	18.190.299.272	240.019.965
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	40.691.530.984	42.708.518.572	2.016.987.588
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	500.000	150.000.000	149.500.000
			Efisiensi	-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Meningkatnya Konektivitas Wilayah antara lain :



Tabel 3. 7

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tingkat capaian Realisasi	Realisasi keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	94,5%
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	123.08 %	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100.45 %	
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	106.8 %	
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Presentase ketersediaan perlengkapan jalan	134.63 %	97%
		Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	85.71%	
		Persentase kendaraan yang melakukan uji laik	75.52 %	
		prosentase wilayah yang terhubung angkutan jalan	100 %	
		Persentase pelaksanaan Manajamen rekayasa lalu lintas	100%	
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase prasarana angkutan sungai	100%	99,8%
		Prosentase wilayah yang terhubung angkutan sungai	100%	

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas 2025

Dinas Perhubungan memiliki 3 Program untuk menunjang keberhasilan Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Mengenai Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Kabupaten/Kota capaian kinerja 107,5 % dan realisasi keuangannya mencapai 94,5 %, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan rata-rata capaian kinerjanya 99,17 % dan realisasi keuangannya mencapai 97 %, Program Pengelolaan Pelayaran capaian rata-rata kinerjanya adalah 100 % dan realisasi keuangannya 99,8 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 3 program di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program ini bertujuan untuk Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah terkhusus pada penyelenggaraan perhubungan. Pada Dinas Perhubungan untuk program ini ada pada Dinas induk, UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, dan UPTD Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan yang terdiri atas 14 (empat belas) kegiatan dan 50 (lima puluh lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.190.299.272 dengan realisasi sebesar Rp 17.198.087.162 dengan tingkat capaian sebesar 94,5% ;
- 2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),
Program ini bertujuan meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas, terdiri atas 8 (Delapan) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.708.518.572 dengan realisasi sebesar Rp 41.425.772.249 dengan tingkat capaian sebesar 97% ;
- 3) Program Pengelolaan Pelayaran
Program ini bertujuan meningkatnya Pengelolaan Pelayaran, terdiri atas 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 149.650.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,8 %.



2. Sasaran : **Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Konektivitas Wilayah**

a. Perbandingan antara target kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Perbandingan antara target dan realisasi indikator sasaran

Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Layanan Sarana dan

Prasarana Konektivitas Wilayah tahun 2025 ditampilkan pada tabel

3.8 sebagai berikut :

Tabel 3. 8

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.75	0.75	100
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.8	0.8	100
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.48	135.14

Tahun 2025 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026. Dalam periode ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menetapkan satu sasaran dengan tiga indikator utama. Salah satu indikator tersebut adalah Indeks Konektivitas Angkutan Sungai (IK2), yang dihitung menggunakan rumus: (Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut). Adapun Jumlah trayek angkutan sungai yang dilayani di Kabupaten Banyumas sebanyak 3 trayek dengan kebutuhan trayeknya 4 trayek. Kemudian terkait bobot trayek yang didapat adalah 1 dimana Kabupaten Banyumas untuk frekuensi angkutan sungai pada kategori frekuensi tinggi yakni melintas >5x dalam seminggu. Sehingga untuk Indikator ini diperoleh $(3 \times 1) / 4 = 0.75$, dengan hasil tersebut diartikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah mencapai target yang telah ditentukan.

Pada indikator “Indeks Konektivitas Angkutan Jalan” atau yang biasa disebut IK1 diperoleh dengan rumus (Jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota



tersebut). Adapun Jumlah trayek angkutan sungai yang dilayani di Kabupaten Banyumas sebanyak 121 trayek dengan kebutuhan trayeknya 121 trayek. Kemudian terkait bobot trayek yang didapat adalah 0.8 dimana Kabupaten Banyumas untuk frekuensi rata-rata angkutan jalan pada kategori frekuensi sedang yakni melintas 3-4 kali dalam seminggu. Sehingga untuk Indikator 3 ini diperoleh $(121 \times 0,8) / 121 = 0.8$, dengan hasil tersebut diartikan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah mencapai target yang telah ditentukan.

Pada indikator “V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota” diperoleh dari rata-rata V/C (Volume/ Capacity) pada 28 Ruas Jalan di Jalan Kabupaten Banyumas. V/C ratio di jalan kabupaten/kota adalah perbandingan antara volume lalu lintas dengan kapasitas jalan yang dihitung melalui survey lalu lintas dari per ruas jalan yang kemudian dirata-rata. Adapun data ini adalah data negatif, dimana hasil dari indikator ini adalah 0,48 dari target 0,74. V/C ratio ini dapat menggambarkan kinerja lalu lintas kabupaten/kota, dimana hasil dari indikator ini termasuk pada kategori C yakni lalu lintas Kabupaten Banyumas dapat dikatakan stabil.

- b. Perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan 3 tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi dan capaian indikator kinerja tujuan meningkatnya konektivitas wilayah tahun 2025 dengan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 s.d 2025 ditampilkan pada tabel 3.9 sebagai berikut :

Tabel 3. 9

Perbandingan Capaian Kinerja tahun 2022 s.d 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2022				
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.375	0.125	33.33
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.8	0.8	100
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.74	100



Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tahun 2023				
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.5	0.75	150
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.8	0.8	100
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.6	118.92
Tahun 2024				
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.75	0.75	100
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.8	0.8	100
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.45	139.19
Tahun 2025				
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.75	0.75	100
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.8	0.8	100
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.48	135.14

Pada tahun 2022, capaian kinerja Dinas Perhubungan untuk indikator Indeks Konektivitas Angkutan Sungai tidak mencapai target. Hal ini disebabkan oleh perhitungan yang berbasis pada jumlah trayek angkutan sungai, sementara di Kabupaten Banyumas hanya terdapat 2 dermaga yang melayani 1 trayek. Keterbatasan infrastruktur ini menjadi faktor utama yang memengaruhi hasil pencapaian indikator tersebut.

Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melakukan perhitungan ulang terhadap indikator capaian kinerja. Seiring berjalannya waktu, load factor angkutan sungai di Banyumas terus meningkat. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, dilakukan rerouting trayek, dari semula 1 trayek menjadi 3 trayek.



Perubahan ini berdampak positif pada Indeks Konektivitas Angkutan Sungai, yang akhirnya melampaui target yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2024, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas berhasil mencapai target yang ditentukan. Salah satu indikator penting, VC Ratio, mengalami penurunan dari 0.6 menjadi 0.45. Penurunan ini disebabkan oleh pembukaan jembatan mandirancan pegalongan, yang memperluas persebaran kendaraan dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan Bus Trans Banyumas turut berkontribusi dalam menekan volume kendaraan pribadi, sehingga arus lalu lintas menjadi lebih lancar dibandingkan tahun 2023.

Pada tahun 2025, dengan telah dilakukannya survey pada 28 ruas jalan di Kabupaten Banyumas mendapatkan hasil V C Ratio 0,48. Dengan diartikan bahwa tingkat kepadatan lalu lintas di Kabupaten Banyumas adalah lancar.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tujuan Meningkatnya Konektivitas Wilayah tahun 2025 dengan target akhir pada Renstra ditampilkan pada tabel 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3. 10

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Renstra

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2025			Target 2026 akhir Renstra	Persentase Kinerja Renstra s.d th 2025
		Target	Realisasi	%		
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	Nilai	0.75	0.75	100	0.75	100
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	Nilai	0.8	0.8	100	0.8	100
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	Nilai	0.74	0.48	135.14	0.74	139.19



Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian Kinerja Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas apabila disandingkan dengan target renstra telah mencapai target Renstra.

- d. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional dan provinsi dan kabupaten sekitar (barlingmascakeb)
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional, provinsi dan kabupaten sekitar ditampilkan pada tabel 3.11 sebagai berikut :

Tabel 3. 11
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan standar nasional,provinsi dan kabupaten

Indikator Kinerja	Realisasi	Standar Nasional	Provinsi Jateng	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara	Kab. Cilacap	Kab. Kebumen
Indeks Konektivitas Angkutan Sungai	0.75	0.404	0.333	NA	NA	NA	NA
Indeks Konektivitas Angkutan Jalan	0.8	0.631	0.354	NA	0.93	NA	0.64
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.48	NA	NA	0.49	0.93	0.38	0.64

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas, 2025

Capaian kinerja dari 3 indikator sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Konektivitas Wilayah di beberapa daerah sekitar memiliki hasil yang berbeda-beda. Terkait standar nasional, untuk ketiga indikator tersebut tidak ada standar nasional yang mengikat, hanya saja pada tabel 3.10 merupakan hasil dari capaian Kementerian Perhubungan. Pada indeks konektivitas angkutan sungai, hitungan tersebut tergantung pada karakteristik masing-masing daerah. Apabila di sandingkan dengan nasional dan provinsi capaian Kabupaten Banyumas dibawah Nasional dan diatas provinsi.



Untuk indeks angkutan jalan Kabupaten Banyumas juga tidak jauh dari capaian nasional. Mengenai V/C Ratio Kabupaten Banyumas masuk di kategori tingkat pelayanan lalu lintas C, dimana tingkat tersebut di rentan 0,45-0,74. Tingkat pelayanan C memiliki arti arus stabil, tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan.

- e. penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja, serta solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan dalam pencapaian target adalah :

1. Sosialisasi penggunaan angkutan umum seperti Banyumas Raya Trans berjalan efektif;
2. Optimalnya penerapan kebijakan trayek angkutan umum;
3. Optimalnya penerapan kebijakan trayek angkutan sungai;

Solusi yang telah dilakukan dalam pencapaian target adalah

1. Adanya hambatan pada terbatasnya anggaran untuk sosialisai secara langsung kepada masyarakat terkait angkutan banyumas, sehingga solusi kami memanfaatkan social media terkait sosialisai tentang angkutan banyumas;
2. Dokumen kajian trayek belum tersusun dan keterbatasan anggaran masih menjadi kendala dalam peningkatan konektivitas jalan. Sebagai solusi, Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas dalam penyusunan kajian lalu lintas dan Peraturan Bupati terkait pelayanan perhubungan. Selain itu, pada tahun 2025 dialokasikan tambahan anggaran fiskal untuk mendukung peningkatan infrastruktur konektivitas jalan.
3. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan Dinporabudpar dalam pengembangan transportasi sungai sebagai pendukung sektor pariwisata. Dalam kerja sama ini, Dinas Perhubungan berperan melakukan pemeliharaan halte atau dermaga sungai guna memastikan kelancaran dan kenyamanan transportasi sungai.



- f. analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Selama Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melakukan berbagai upaya efisiensi antara lain :
- 1) Mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
 - 2) Menggunakan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan pada jam kerja dengan lebih optimal sehingga menunjang kelancaran pelaksanaan aktivitas program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
 - 3) Melakukan efisiensi penyerapan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan tetap berorientasi pada kualitas capaian target kinerja
 - 4) Melakukan refocussing atas program kegiatan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung tercapainya target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan diperoleh adanya efisiensi anggaran sebagai berikut :

Tabel 3. 12

Efisiensi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.950.279.307	18.190.299.272	240.019.965
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	40.691.530.984	42.708.518.572	2.016.987.588



No	Program/kegiatan	Anggaran Awal (induk 2025) (Rp)	Anggaran Akhir (perubahan 2025) (Rp)	Selisih (Rp)
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	500.000	150.000.000	149.500.000
			Efisiensi	-

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

- g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
- Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja tujuan Meningkatnya Konektivitas Wilayah antara lain :

Tabel 3. 13

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

No	Program	Indikator	Tingkat capaian Realisasi	Realisasi keuangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100 %	94,5%
		Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	123.08 %	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100.45 %	
		Nilai SPIP Perangkat Daerah	106.8 %	
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Presentase ketersediaan perlengkapan jalan	134,63%	97%
		Persentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	85,71%	
		Persentase kendaraan yang melakukan uji laik	75.52 %	
		prosentase wilayah yang terhubung angkutan jalan	100%	
		Persentase pelaksanaan Manajamen rekayasa lalu lintas	100%	



3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase prasarana angkutan sungai	100%	99,8%
		Prosentase wilayah yang terhubung angkutan sungai	100%	

Sumber : e-Monev Kabupaten Banyumas 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas melaksanakan tiga program utama untuk mendukung pencapaian tujuan strategisnya. Ketiga program ini tidak hanya menunjukkan kinerja yang optimal tetapi juga efisiensi dalam penggunaan anggaran. Berikut rincian pencapaiannya:

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini bertujuan meningkatkan kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah, khususnya di sektor perhubungan. Program ini dipegang dinas dan 2 UPTD yang terdiri atas 14 (empat belas) kegiatan dan 50 (lima puluh lima) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 18.190.299.272 dengan realisasi sebesar Rp 17.198.087.162 dengan tingkat capaian sebesar 94,5% ;

2) **Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas. Program ini terdiri atas 8 (Delapan) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 42.708.518.572 dengan realisasi sebesar Rp 41.425.772.249 dengan tingkat capaian sebesar 97% ;.

3) **Program Pengelolaan Pelayaran**

Program ini bertujuan meningkatkan pengelolaan pelayaran di Kabupaten Banyumas. Program ini terdiri terdiri atas 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 150.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 149.650.000 dengan tingkat capaian sebesar 99,8 %.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga program ini telah berjalan dengan baik, mencapai target kinerja yang tinggi,



serta menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran guna mendukung transportasi yang lebih baik di Kabupaten Banyumas.

C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025 target pendapatan Retribusi di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp 6.680.882.771. Selanjutnya pada akhir tahun 2025 Dinas Perhubungan mencapai realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp 3.386.298.783 (sebesar 50.68 % dari target).

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2025 mengalokasikan Belanja Operasi sebesar Rp 53.896.066.844,00 Sedangkan untuk anggaran Belanja Modal Tahun 2025 Dinas Perhubungan sebesar Rp 7.152.751.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp 61.048.817.844,00 dan pada akhir tahun anggaran 2025 capaian realisasi sebesar Rp 58.773.509.861 atau sebesar 96.27 %

Tabel 3. 14

Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
Belanja Modal	Rp 7.152.751.000	Rp 6.998.957.050	Rp 153.793.950
Belanja Operasi	Rp 53.896.066.844	Rp 51.774.552.811	Rp 2.121.514.033
Jumlah	Rp 61.048.817.844	Rp 58.773.509.861	Rp 2.275.307.983

Untuk realisasi anggaran per sasaran kegiatan akan disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. 15

Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Per Sasaran Tahun 2025

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Prosentase Realisasi Anggaran
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Rp 61.048.817.844	Rp 58.773.509.861	96.27 %
2.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah	Rp 61.048.817.844	Rp 58.773.509.861	96.27 %

D. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

Untuk tingkat efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran akan disajikan dalam tabel di bawah ini :



Tabel 3. 16

Tingkat Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1	100	Rp 58.773.509.861	96.27
2.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah	3	111.71	Rp 58.773.509.861	96.27

Untuk tingkat efisiensi anggaran terhadap penggunaan sumber daya akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. 17

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Prosentase Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	1	100	96.27	3.73
2.	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana konektivitas wilayah	3	111.71	96.27	15.44

Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

Pelaksanaan Pemilihan Penyedia barang/jasa (tender) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dilaksanakan oleh Bagian Layanan Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 telah dilaksanakan sebanyak 154 Paket pekerjaan dengan total HPS sebesar Rp 15.172.034.762, realisasi kontrak sebesar Rp 15.733.566.909, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 561.532.147, atau 3.7%



Untuk pengadaan barang/jasa yang sudah tersedia di dalam *e-catalog* dilaksanakan dengan metode *e-purchasing* dan pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melaksanakan sebanyak 116 paket dengan nilai total rencana pengadaan sebesar Rp 12.517.971.637, realisasi pengadaan sebesar Rp 12.739.729.140, sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp 221.757.503, atau 1.77 %.

E. PRESTASI DINAS PERHUBUNGAN

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas cukup memberikan berbagai prestasi yang membanggakan, yakni sebagai berikut :

1. PERINGKAT I PENILAIAN KEMATANGAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (KOPD) TAHUN 2025 KATEGORI SEKRETARIAT/INSPEKTORAT/DINAS/BADAN/RUMAH SAKIT

Pada tanggal 25 November Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mendapat penghargaan peringkat i penilaian kematangan organisasi perangkat daerah (kopd) tahun 2025 kategori sekretariat/inspektorat/dinas/badan/rumah sakit, dengan nilai 51.



2. PERINGKAT III ORGANISASI PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK PADA PENILAIAN PEKPPP MANDIRI INSTANSIONAL TAHUN 2025, KATEGORI SEKRETARIAT/INSPEKTORAT/DINAS/BADAN/RUMAH SAKIT/KLINIK

Pada tanggal 25 November Tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mendapat penghargaan peringkat III organisasi penyelenggara pelayanan publik pada penilaian pekppp mandiri instansional tahun 2025,





kategori sekretariat/inspektorat/dinas/badan/rumah sakit/klinik, dengan nilai 4.32.

3. PARTISIPASI DONOR DARAH SERENTAK SE-JATENG DALAM RANGKA HARHUBNAS TAHUN 2025 TINGKAT PROVINSI





BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Tujuan Dinas Perhubungan “Meningkatnya Konektivitas Wilayah” dengan satu indikator yakni “Rasio Konektivitas Wilayah” mencapai kinerja 100%. Sedangkan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas “Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Konektivitas Wilayah” dengan memiliki 3 indikator telah mencapai rata-rata kinerjanya 111,71 %.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 indikator kinerja tersebut, secara umum Dinas Perhubungan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 61.048.817.844 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp



58.773.509.861 dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 terdapat Silpa sebesar Rp 2.275.307.983

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2025 telah menggunakan anggaran sebesar Rp 58.773.509.861 dan telah mewujudkan capaian kinerja dengan peringkat “Sangat Tinggi” sesuai Skala pemeringkatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini menunjukkan kinerja Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sudah bagus dan perlu dipertahankan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah 96,3 % dari total anggaran yang direncanakan. Hal tersebut menunjukan bahwa Dinas Perhubungan dapat menghemat anggaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banyumas.

B. PROGRES PENYELESAIAN ISU-ISU STRATEGIS

Dalam perjalanan mencapai target empat indikator, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas menghadapi beberapa hambatan. Namun, berkat upaya mencari solusi, Dinas Perhubungan tetap berhasil mencapai target yang telah ditetapkan secara keseluruhan. Penyelesaian terhadap isu-isu strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana penunjang kinerja lalu lintas, seperti marka, rambu, dan penggantian traffic light yang terintegrasi dengan ATCS, masih belum memadai. Potensi hambatan muncul dalam bentuk biaya maintenance/perawatan ATCS yang tinggi, memerlukan alokasi anggaran yang signifikan. Oleh karena itu, kami melakukan prioritas penggunaan anggaran untuk meningkatkan efisiensi penggunaan ruang pada persimpangan yang diatur dengan alat pengatur isyarat lalu lintas. Selain itu dengan semakin meningkatnya kepadatan lalu lintas maka Traffic light yg responsif dan terintegrasi juga sangat diperlukan agar tdk terjadi antrian yg panjang di simpang. Tahun 2025 Dinas Perhubungan telah melakukan



prioritas anggaran untuk pengadaan perlengkapan jalan untuk menunjang keberhasilan dan pemenuhan perlengkapan jalan.

2. Dalam upaya mencapai indikator kinerja terkait pelaksanaan program BTS Load factor, Kabupaten Banyumas menghadapi kendala karena keterbatasan anggaran APBD untuk dokumen trayek yang diperlukan dalam pengukuran kinerja trayek. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu Kementerian Perhubungan dan PT. Banyumas Raya Transportasi, untuk menciptakan moda transportasi yang aman dan nyaman, yakni Bus Rapid Transit. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat implementasi program dan mencapai hasil yang optimal. Kabupaten Banyumas juga telah mendapat limpahan 1 koridor yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan akan di *launching* tanggal 2 Januari 2026.
3. Dalam upaya mencapai indikator kinerja terkait konektivitas angkutan sungai, Kabupaten Banyumas menghadapi situasi di mana pada tahun 2025 hanya terdapat dua halte sungai, yaitu Halte Sungai Desa Papringan dan Halte Sungai Desa Tambaknegara. Meskipun demikian, pelaksanaan di kedua halte tersebut menemui beberapa kendala, terutama terkait ketidaktersediaan rambu-rambu sungai. Kami terus menjalin kerjasama dengan Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan dukungan anggaran dari APBN guna pembangunan Dermaga Kedunguter. Dokumen Rencana Teknis (DED) Dermaga Kedunguter telah disusun, dan rencananya pembangunan Dermaga Kedunguter akan segera dilaksanakan, dan rencana pembangunan Dermaga Kedunguter juga sudah kami lakukan kembali bersurat ke Kementrian Perhubungan untuk dapat masuk dalam prioritas kegiatan pada Renstra Kementrian Perhubungan Tahun 2025-2029;
4. Terkait dengan kegiatan pengoperasional terminal
 - a. Di Kabupaten Banyumas, saat ini ada 5 terminal yang sudah beroperasi yaitu 1) Terminal bulupitu 2) Terminal ajibarang 3) Terminal wangon 4) Terminal karanglewas an 5) Terminal Baturraden.
 - b. Pengoperasionalan terminal pada tahun 2025 menghadapi tantangan serius akibat masih banyaknya kios yang mengalami kerusakan serta fasilitas umum yang rusak, termasuk kamar mandi, ruang tunggu, atap plafon, dan drainase. Kerusakan kios berdampak langsung pada



penurunan Pendapatan Daerah karena kios yang tidak dapat disewakan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan perbaikan menyeluruh pada kios yang rusak guna memastikan ketersediaan dan fungsionalitasnya

- c. Selain itu, dalam menghadapi kendala fasilitas umum, telah dilakukan penyesuaian anggaran tahun 2025 dengan menetapkan alokasi dana untuk perbaikan drainase dan perbaikan jalan di area parkir. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna terminal serta mendukung operasional yang lancar. Dengan adanya perbaikan ini, diharapkan fasilitas umum yang berkualitas akan meningkatkan citra dan pelayanan terminal, sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang optimal bagi daerah.
 - d. Pada tahun 2025, proyek pembangunan Terminal Sokaraja telah dimulai.
5. Terkait dengan kegiatan angkutan
- a. Adanya ketentuan usia teknis kendaraan untuk Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan berdasarkan Perda No. 1 tahun 2015, seiring dengan Permen No. 98 Tahun 2019 yang menetapkan usia teknis Angkutan Kota selama 20 tahun dan Angkutan Pedesaan selama 15 tahun. Kondisi ini mengakibatkan beberapa kendaraan tidak dapat melaksanakan izin trayeknya karena telah melewati batas usia yang diatur, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
 - b. Diperlukan kajian teknis terkait jumlah kendaraan di suatu kawasan untuk menentukan kuota layanan, mengingat belum adanya pengaturan terkait berapa kendaraan yang akan melayani dalam satu kawasan. Hal ini menjadi krusial agar para penumpang dapat terlayani dengan baik dan sampai ke kawasan tujuan mereka.
 - c. Tahun 2026 pemda Banyumas sudah mengambil alih / hand over Program BTS secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selama Tahun 2025. Semoga Dinas Perhubungan dapat selalu meningkatkan



kinerja organisasi guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Banyumas, Januari 2026

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS**



OMAR UDAYA, S.STP., M.SI

Pembina Utama Muda

NIP. 19770104 199603 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Tujuan DINHUB : Meningkatkan konektivitas wilayah	a Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0.785	0.785	100
2	Sasaran 1 : Meningkatnya konektivitas angkutan jalan	a Indeks konektivitas angkutan jalan	0,8	0,8	100
3	Sasaran 2 : Meningkatnya konektivitas angkutan sungai	a Indeks konektivitas angkutan sungai	0.75	0,75	100
4	Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	a V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.74	0.48	135,14

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18.190.299.272	17.198.087.612	94,5
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	42.708.518.572	41.425.772.249	97,0
3	Program Pengelolaan Pelayaran	150.000.000	149.650.000	99,8

Purwokerto, Desember 2025
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS
OMAR UDAYA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770104 199603 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100
1.1	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7 Paket	700
1.2	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	5 Paket	166,66
1.3	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	75
1.4	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	4 Paket	80
1.5	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	4 Paket	200
1.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	133 Laporan	221,66
2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100
2.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	100
2.2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
3	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	12 Laporan	400
3.1	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	100
4	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100
4.1	Terlaksananya Penyediaan Jas Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	10 Unit	100

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
4.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	100
4.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	100
5	Terlaksananya Pelayanan Angkutan Sungai	1 Jumlah Pelabuhan/ Dermaga/Halte Sungai yang Beroperasi Dengan Baik	2 Unit	2 Unit	100
6	Terlaksananya Pelayanan Bus Sekolah Gratis dan Bus Pariwisata Gratis	1 Jumlah Armada Bus Sekolah Gratis dan Bus Pariwisata Gratis yang	9 Unit	9 Unit	100
7	Terlaksananya Pelayanan Trans Banyumas	1 Jumlah Rata-Rata Load Factor Trans Banyumas	50%	50%	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	506.077.162	503.123.338	99,42%
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.999.500	1.962.000	98,12%
1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.750.000	11.439.380	97,36%
1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.553.000	9.083.699	95,09%
1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	397.517.662	395.549.054	99,50%
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.707.000	6.665.200	99%
1.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.550.000	78.424.005	99,84%
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82.700.000	77.450.400	93,65%
2.1	Penyediaan Jasa komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	6.700.000	2.414.400	36,04%
2.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	76.000.000	75.036.000	98,73%
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.500.000	21.632.499	96,14%
3.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.500.000	21.632.499	96,14%
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	318.570.000	292.730.410	91,89%
4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	255.000.000	230.862.900	90,53%
4.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.570.000	3.540.000	99%
4.3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000	58.327.510	97,21%

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

OMAR UDAYA, S.STP.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, Desember 2025
KEPALA UPTD PSPP DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

MUHAMAD SOLEH WIBOWO,S.E
Penata Tk.I
NIP. 19810520 201101 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI (Unit)	CAPAIAN (%)
1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	100
1.1	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100
1.2	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	13 Paket	100
1.3	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	8 Paket	100
1.4	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	33 Paket	100
1.5	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	4 Paket	4 Paket	100
1.6	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Jumlah Laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2 Laporan	1 Paket	100
2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	8 Laporan	8 Laporan	687
2.1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	39 Laporan	108,33
3	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Jumlah pemeliharaan barang/gedung milik daerah yang dilaksanakan	45 Laporan	59 Laporan	131,11
3.1	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	43 Unit	100
3.2	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	1 Unit	100
3.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Unit	1 Unit	100
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jumlah laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah	3 Laporan	3 Laporan	100
4.1	Tersedianya Mebel	1 Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 Paket	1 Unit	100
4.2	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau	1 Unit	4 Unit	100
4.3	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1 Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	3 Unit	4 Unit	100

NO	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.735.632	124.198.551	89,52%
1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.644.000	4.475.520	96,37%
1.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.707.500	49.719.906	87,68%
1.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.324.000	12.753.675	95,72%
1.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.850.000	43.313.950	88,67%
1.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.008.530	2.001.500	99,65%
1.6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.201.602	11.934.000	90,40%
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	114.355.000	101.451.277	88,72%
2.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	114.355.000	101.451.277	88,72%

NO	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.307.000	220.033.000	99,42%
3.1	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	141.915.000	140.717.000	99,16%
3.2	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.062.000	4.996.000	98,70%
3.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung geduung kantor atau	74.330.000	74.320.000	99,99%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	373.261.500	361.291.750	96,79%
4.1	Pengadaan Mebel	11.000.000	9.990.000	90,82%
4.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	54.910.000	44.731.250	81,46%
4.3	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	307.351.500	306.570.500	99,75%

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

OMAR UDAYA, S.STP.,M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, Desember 2025
Pit. KEPALA UPTD PKB DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

SUGENG PUJIONO, S.H
Penata Muda Tk.I
NIP. 19880508 201101 1 004

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TH 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	1	Nilai Maturitas SPIP (PK)	3,5	3,738	3,738
		1	Nilai SAKIP (PK)	88,5	88,5	100
		1	Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan perangkat daerah	100	100	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	16.412.792.978	15.496.176.387	94,42
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.943.870	17.002.900	85,25
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.118.653.406	8.424.226.965	92,38
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	930.140.482	897.013.057	96,44
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	490.139.500	486.434.300	99,24
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.717.545.720	4.542.596.178	96,29
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.136.370.000	1.128.902.987	99,34

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

OMAR UDAYA,S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, Desember 2025
SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

ARI KUSYONO,S.E.M.Si
Pembina
NIP. 19711109 199603 1 003

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN
KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2024	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	3 Dokumen	4Dokumen	133.33
1,1	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100
1,2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinera Pernagkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100

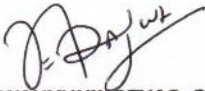
NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.943.870	17.002.900	85,25
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.143.870	15.202.900	83,79
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.800.000	1.800.000	100,00

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS



ARI KUSYONO, S.E.M.Si
Pembina
NIP. 19711109 199603 1 003

Purwokerto, Desember 2025
KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS



NUKI LESTARI WAHYUNINGTYAS, S.H.,M.A.P
Penata Tk.I
NIP. 19971216 0201001 2 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Telaksananya Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	4 Laporan	133,33
1.1	Terlaksananya Pengadaan mebel	1 Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	40 Unit	100
1.2	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang Disediakan	7 Unit	13 Unit	185,71
1.3	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Jumlah Unit Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	8 Unit	114,28
2	Telaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5 Laporan	5 Laporan	100
2.1	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	1 Jumlah Kendaraan operasional Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	42 Unit	100
2.2	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 Unit	20 Unit	100
2.3	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100
2.4	Terlaksananya pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1 Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	100
3.1	Terlaksananya Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	3 Paket	150
3.2	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	13 Paket	216,67
3.3	Terlaksananya penyediaan peralatan Rumah Tangga	1 Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	6 Paket	200
3.4	Terlaksananya penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket	39 Paket	114,71
3.5	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	1 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	27 Paket	112,5
3.6	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi	45 Laporan	100 Laporan	222,22

3.6	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	200 Dokumen	100
4	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Jumlah Laporan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3 Laporan	4 Laporan	133,33
4.1	Terlaksananya Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	65 Laporan	71 Laporan	109,23
4.2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	15 Laporan	15 Laporan	100
4.3	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1	Jumlah Laporan Penyediaan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan	98 Laporan	102,08

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	490.139.500	486.434.300	99,24
1,1	Pengadaan Mebel	133.500.000	133.476.000	99,98
1,2	Pengadaan Pealatan dan Mesin Lainnya	136.585.000	133.206.800	97,53
1,3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	220.054.500	219.751.500	99,86
2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.136.370.000	1.128.902.987	99,34
2,1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	297.200.000	295.660.387	99,48
2,2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	63.190.000	60.197.600	95,26
2,3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	566.780.000	565.705.000	99,81
2,4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	209.200.000	207.340.000	99,11
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	930.140.482	901.995.057	96,97
3,1	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	15.404.500	14.872.000	96,54
3,2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	126.525.500	122.915.233	97,15
3,3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.019.992	46.697.050	97,25
3,4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	360.969.000	354.619.866	98,24
3,5	Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan	23.427.425	18.063.600	77,10
3,6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	343.233.065	327.284.308	95,35
3,7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.561.000	12.561.000	100
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.717.545.720	4.542.596.178	96,29
4,1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	587.800.000	504.937.741	85,90
4,2	Penyediaan jasa peralatan dan pelayanan umum	20.000.000	20.000.000	100,00
4,3	Penyediaan jasa Pelayanan umumk kantor	4.109.745.720	4.017.658.437	97,76

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS



ARI KUSYONO,S.E.M.Si
Pembina
NIP. 19711109 199603 1 003

Purwokerto, Desember 2025
KEPALA SUBBAGIAN UMUM & KEPEGAWIAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS



Rr.NIKE ANDRIYANI L. S.H.
Penata Tk.I
NIP. 19701008 199003 2 006

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100
1.1	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/bulan	62 Orang/bulan	95,38
1.2	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.118.653.406	8.424.226.965	92,38
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.841.663.406	8.155.637.165	92,24
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	276.990.000	268.589.800	96,97

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS


ARI KUSYONO, S.E.M.Si
Pembina
NIP. 19711109 199603 1 003

Purwokerto, Desember 2025
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS


DIAN ARUM PERDANA, A.Ma. PKB., S.H.
Penata Tk.I
NIP.199009152011012001

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET TH 2025 (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas	1	Persentase ketersediaan kelengkapan jalan	4,10	5,52	134,63
		2	Persentase pelaksanaan Manajamen rekayasa lalu lintas	100	100	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	28.683.537.817	27.798.853.328	96,92
1,1	Pelaksanaan Manajamen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.656.857.625	1.629.971.180	98,38
1,2	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	27.026.680.192	26.168.882.148	96,83

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS


OMAR UDAYA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, Desember 2025
KEPALA BIDANG LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS


ARIF AKHMADI, S.SIT
Pembina
NIP. 19780605 200012 1 005

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Kondisi Baik (PK)	147 unit	2293Unit	1559,86
1	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	147 unit	2293Unit	1559,86
1.1	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1,1 Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	102 Unit	244 Unit	253,21
1.2	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1,2 Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	45 Unit	59 Unit	131,11

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota	27.026.680.192	26.168.882.148	96,83
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1.434.839.000	1.322.634.802	92,18
1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	25.591.841.192	24.846.247.346	97,09

KEPALA BIDANG LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS


ARIF AKHMADI, S.SIT
Pembina
NIP. 19780605 200012 1 005

Purwokerto, Desember 2025
KEPALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS


TRI HARSONO, S.T., M.Sc
Penata Tk.I
NIP. 19840513 200912 1 005

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS
KABUPATEN BANYUMAS

	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Perlengkapan Jalan	1 Jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
		2 Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas yang terpasang	18 unit	18 Unit	100
1.1	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	100
1.2	Terlaksananya Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1 Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	12 Dokumen	12 Dokumen	100

NO	Kegiatan dan Sub Kegiatan	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1.656.857.625	1.629.971.180	98,38
1.1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	168.100.000	167.334.000	99,54
1.2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1.488.757.625	1.462.637.180	98,25

KEPALA BIDANG LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS


ARIF AKHMADI,S.SIT
Pembina
NIP. 19780605 200012 1 005

Purwokerto, Desember 2025
KEPALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS


M. EKA NUGRAHA, A.Md., LLAJ
Penata Tk. I
NIP. 19770302 200012 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN KESELAMATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas	1 Persentase Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (PK)	100%	100%	100%
		1 Persentase kendaraan yang melakukan uji laik	94%	70,52%	75,52
		1 Prosentase wilayah yang terhubung angkutan jalan	93%	100%	107,99
		1 Persentase pelaksanaan Manajemen rekayasa lalu lintas	100%	100%	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.468.397.625	2.402.057.350	97,31
1.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kora dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	24.500.000	23.777.490	97,05
1.2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lalu Lintas Daerah Kabupaten/Koa dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	500.000	500.000	100,00
1.3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.438.397.625	2.373.279.860	97,33
1.4	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	5.000.000	4.500.000	90,00

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

OMAR UDAYA, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, Desember 2025
KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN KESELAMATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

MUFTI HAKIM, SH
Penata Tk. I
NIP. 1981020 201101 1 008

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI ANGKUTAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Jumlah angkutan umum yang beroperasi	80 Unit	102 Unit	127,5
1.1	Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	80 Unit	102 Unit	127,5
2	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupten/kota dalam 1 (satu) Daeah Kabupten/Kota	1 Jumlah dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen	1	100
2.1	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kbupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Oang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Teirntegrasi Secara Elektronik	10 Laporan	17	190

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daeah Kabupaten/Kota	24.500.000	23.777.490	97,05
1.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daeah Kabupaten/Kota	24.500.000	23.777.490	97,05
2	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Dearah Kabupaten/Kota	500.000	500.000	100,00
2.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara	500.000	500.000	100,00

Purwokerto, Desember 2025

KEPALA BIDANG ANGKUTAN & KESELAMATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

MUFTI HAKIM, SH

Pembina Tk. I
NIP. 1981020 201101 1 008

KEPALA SEKSI ANGKUTAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

OKTAVIA YULIANTO,S.E

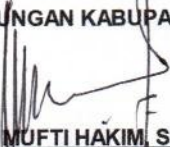
Penata Tk.I
NIP. 19811020 201101 1 008

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI KESELAMATAN
KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Persentase capaian kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas (PK)	100%	100%	100%
1	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Jumlah kendaraan Bermotor yang melakukan uji kendaraan bermotor yang terlayani	8583 unit	11.321 Unit	131,9
1.1	Terlaksananya Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8583 Dokumen	12.622 Dokumen	147,06
2	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
2.1	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3	Terlaksananya Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	1 Jumlah dokumen audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	1 Dokumen	1 Dokumen	100
3.1	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan	5 Laporan	250

NO	KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.438.397.625	2.373.279.860	97,33
1.2	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.438.397.625	2.373.279.860	97,33
2	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	5.000.000	5.000.000	100,00
2.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	5.000.000	4.500.000	90,00

KEPALA BIDANG ANGKUTAN & KESELAMATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS


MUFTI HAKIM, SH
Penata Tk.
NIP. 19690406 199002 1 002

Purwokerto, Desember 2025
Pit. KEPALA SEKSI KESELAMATAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

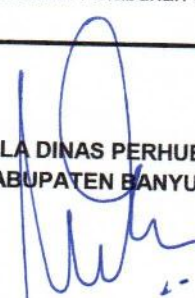

TRI HARSONO, S.T., M.Sc
Pembina
NIP. 19840513 200912 1 005

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PRASARANA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas	1 Presentase Ketersediaan Prasarana Jalan (PK)	38,6	38,71	100,28
		1 Presentase terminal yang beroperasi sesuai ketentuan	87,5	75	85,71
		1 Presentase ketersediaan kelengkapan jalan	3,86	5,52	143,01
2	Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran	1 Persentase prasarana angkutan sungai	66,66	66.66	100
		1 Persentase wilayah yang terhubung angkutan sungai	75	75	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.902.670.755	12.551.897.761	97,28
1.1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.163.964.255	11.816.839.423	97,15
1.2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	738.706.500	735.058.338	99,51
2	Program Pengelolaan Pelayaran	150.000.000	149.650.000	99,77
2.1	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	150.000.000	149.650.000	99,77

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS


OMAR UDAYA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, Desember 2025
KEPALA BIDANG PRASARANA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

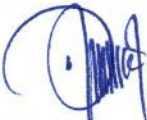

RETNO YULIASTUTI, S.Pd
Penata Tk. I
NIP. 19770728 200801 2 026

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA
KABUPATEN BANYUMAS

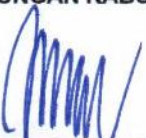
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Jumlah Prasarana Jalan dalam Kondisi Baik (PK)	1973 Unit	2293 Unit	116,22
1	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	1973 Unit	2293 Unit	116,22
1.1	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1 Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	400 Unit	468 Unit	117
1.2	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1 Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1573 Unit	1575 Unit	100,13
2	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Jumlah Prasarana sungai dalam kondisi baik	2 Unit	2 Unit	100
2.1	Terlaksananya Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	1 Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Penyediaan Perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12.163.964.255	11.816.839.423	97,15
1.1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	6.314.335.005	6.174.314.205	97,78
1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	5.849.629.250	5.642.525.218	96,46
2	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	150.000.000	149.650.000	99,77
2.1	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	150.000.000	149.650.000	99,77

KEPALA BIDANG PRASARANA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS


RETNO YULIASTUTI, S.Pd
Penata Tk. I
NIP. 19770728 200801 2 026

Purwokerto, Desember 2025
Pit. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN & PEMELIHARAAN PRASARANA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS


OKTAVIA YULIANTO, S.E
Penata Tk. I
NIP. 19811020 201101 1 008

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TERMINAL
KABUPATEN BANYUMAS

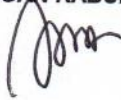
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI (Unit)	CAPAIAN (%)
1	Terlaksananya pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 Jumlah terminal penumpang Tipe C yang dikelola dan beroperasi	6 Terminal	6 Terminal	100
1.1	Terlaksananya Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1 Unit	1 Unit	100
1.2	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	7 Unit	7 Unit	100

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	738.706.500	735.058.338	99,51
1.1	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	250.000.000	248.817.550	99,53
1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	488.706.500	486.240.788	99,50

KEPALA BIDANG PRASARANA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS


RETNO YULIASTUTI, S.Pd
Penata Tk. I
NIP. 19770728 200801 2 026

Purwokerto, Desember 2025
Pit. KEPALA SEKSI TERMINAL
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS


MUHAMMAD EKA NUGRAHA, A.Md.L.L.A.J.
Penata Tk.I
NIP. 19770302 200012 1 002

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPRASIONAL DAN PERPARKIRAN
KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas	1 Prosentase Pelaksanaan Pengendalian Operasional dan Penyelenggaraan Perparkiran (PK)	100%	100%	100%
		1 Persentase pelaksanaan Manajamen rekayasa lalu lintas	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	967.230.000	923.881.610	95,52
1,1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	275.145.000	267.934.990	97,38
1,2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	692.085.000	655.946.620	94,78

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

OMAR UDAYA, S.STP,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, Desember 2025
KEPALA BIDANG PENG. OPS DAN PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

IWAN YULIANTO, S.S., M.AP
Pembina
NIP. 19740721 200312 1 008

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPRASIONAL DAN PERPARKIRAN
KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas	1 Prosentase Pelaksanaan Pengendalian Operasional dan Penyelenggaraan Perpajakan (PK)	100%	100%	100%
		1 Persentase pelaksanaan Manajemen rekayasa lalu lintas	100%	100%	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	967.230.000	923.881.610	95,52
1,1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	275.145.000	267.934.990	97,38
1,2	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	692.085.000	655.946.620	94,78

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

OMAR UDAYA, S.STP.M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, Desember 2025
KEPALA BIDANG PENG. OPS DAN PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

IWAN YULIANTO, SS., M.AP

Pembina
NIP. 19740721 200312 1 008

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN & OPERASIONAL
KABUPATEN BANYUMAS

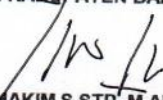
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terlaksananya Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	1 Persentase capaian kegiatan Pengendalian dan operasional LLAJ (PK)	100%	100%	100%
1	Terlaksananya Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	1 Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.1	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/kota	1 Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	35 Laporan	133 Laporan	380

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	692.085.000	655.946.620	94,78
1.1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	692.085.000	655.946.620	94,78

KEPALA BIDANG PENG. OPS DAN PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS


IWAN YULIANTO, S.S., M.AP
Pembina
NIP. 19740721 200312 1 008

Purwokerto, Desember 2025
KEPALA SEKSI PENGENDALIAN & OPERASIONAL
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS


TOMI LUQMAN HAKIM, S.STP., M.AP
Penata Muda Tk.I
NIP. 19960213 201708 1 002

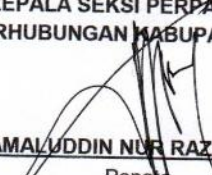
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PERPARKIRAN
KABUPATEN BANYUMAS

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TH 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Terlaksananya penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	1 Jumlah izin penyelenggaraan parkir dan pembangunan fasilitas parkir yang diterbitkan	51	133	260,78
1.1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	50	133	266

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1	Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir	275.145.000	267.934.990	97,38
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	275.145.000	267.934.990	97,38

KEPALA BIDANG PENG. OPS DAN PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS


IWAN YULIANTO, S.S., M.AP
Pembina
NIP. 19740721 200312 1 008

Purwokerto, Desember 2025
KEPALA SEKSI PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

FADHIL JAMALUDDIN NUR RAZAQ, S.STP., M.A.P
Penata
NIP. 19951129 201708 1 002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **OMAR UDAYA,S.STP.,M.Si**
Jabatan : **KEPALA DINAS**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Drs. H. SADEWO TRI LASTIONO,MM**
Jabatan : **BUPATI BANYUMAS**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

OMAR UDAYA,S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19770104 199603 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PERHUBUNGAN

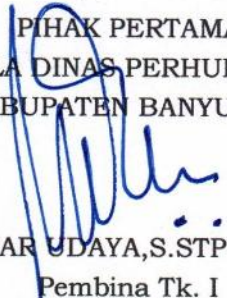
NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Konektivitas Wilayah			
		Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	0.785	Formulasi : Rasio konektivitas kabupaten atau kota = $(IK1 \times \text{bobot angkutan jalan}) + (IK2 \times \text{Bobot angkutan Sungai, danau dan penyebrangan})$ Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : LPPD Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
2.	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Konektivitas Wilayah			
		Indeks konektivitas angkutan jalan	0.8	Formulasi : $IK1 = \frac{\text{Jumlah trayek yg dilayani pada kabupaten/kota} \times \text{bobot trayek}}{\text{jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut}}$ Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Data Trayek Angkutan Jalan
		Indeks konektivitas angkutan sungai	0.75	Formulasi : $IK2 = \frac{\text{jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pada kabupaten/kota tsb} \times \text{bobot lintas}}{\text{jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut}}$ Tipe perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Data Trayek Angkutan Sungai
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0.74	Formulasi : Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Survey Lalu Lintas

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 18.190.299.272	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 42.708.518.572	APBD, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 150.000.000	APBD
	Jumlah	Rp. 61.048.817.844	



Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS



OMAR UDAYA, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770104 199603 1 002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUGENG PUJIONO, S.H
Jabatan : PIt. KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : OMAR UDAYA, S.STP., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

OMAR UDAYA, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA

SUGENG PUJIONO, S.H
Penata Muda Tk.I
NIP. 19880509 201101 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
DINAS PERHUBUNGAN

No.	SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Administrasi Umum
1.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	33 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.6	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Jasa
2.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	29 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	45 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Pemeliharaan Barang
3.1	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit	Formulasi : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

3.2	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas	1 Unit	Formulasi : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitas Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.3	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1.	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi	1 Unit	Formulasi : Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara direhabilitasi Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
4	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Jumlah laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	Formulasi : Jumlah laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
4.1	Tersedianya Mebel	1.	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Mebel yang disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

4.2	Tersedianya sarana dan prasaranan pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	1.	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	<i>Formulasi : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> <i>Tipe Perhitungan : Kumulatif</i> <i>Sumber Data : Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</i>
4.3	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya		Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	3 Unit	<i>Formulasi : Jumlah unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan</i> <i>Tipe Perhitungan : Kumulatif</i> <i>Sumber Data : Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor</i>

Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 138.735.632	APBD
1.1.Penyediaan Komponen Instalasai Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 4.644.000	APBD
1.2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 56.707.500	APBD
1.3.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 13.324.000	APBD
1.4.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 48.850.000	APBD
1.5.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 2.008.530	APBD
1.6.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 13.201.602	APBD
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 114.355.000	APBD
2.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 114.355.000	APBD
3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 221.307.000	APBD
3.1 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 141.915.000	APBD
3.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 5.062.000	APBD
3.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 74.330.000	APBD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 373.261.500	APBD
4.1 Pengadaan Mebel	Rp. 11.000.000	APBD
4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 54.910.000	APBD
4.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 307.351.500	APBD

Purwokerto, November 2025

PIHAK KEDUA

OMAR UDAYA,S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770104 199603 1 002

PIHAK PERTAMA

SUGENG PUJIONO,S.H
Penata Muda Tk.I
NIP. 19880509 201101 1 004



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD SOLEH WIBOWO, S.E
Jabatan : KEPALA UPTD PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : OMAR UDAYA, S.STP., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

OMAR UDAYA, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA

MUHAMAD SOLEH WIBOWO, S.E
Penata Tk.I
NIP. 19810520 201101 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. MargantaraTanjung No. 460 Purwokerto KodePos 53134

Telp.(0281) 637211 Fax. (0281) 637211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA KEPALA UPTD PENGELOLA SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

No.	SASARAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Administrasi Umum
1.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
1.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1.5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1.6	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tipe Perhitungan : Kumulatif

				Sumber Data : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Penyediaan Jasa
1.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan <i>Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> <i>Tipe Perhitungan : Kumulatif</i> <i>Sumber Data : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
1.2	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan <i>Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> <i>Tipe Perhitungan : Kumulatif</i> <i>Sumber Data : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>
3.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Pengadaan
3.1	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit <i>Formulasi : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> <i>Tipe Perhitungan : Kumulatif</i> <i>Sumber Data : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>
4.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	12 Laporan Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Pemeliharaan Barang

4.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	<i>Formulasi : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> <i>Tipe Perhitungan : Kumulatif</i> <i>Sumber Data : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>
4.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	<i>Formulasi : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i> <i>Tipe Perhitungan : Kumulatif</i> <i>Sumber Data : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>
4.3	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	<i>Formulasi : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi</i> <i>Tipe Perhitungan : Kumulatif</i> <i>Sumber Data : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>

Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 506.077.162	APBD
1.1.Penyediaan Komponen Instalasai Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 1.999.500	APBD
1.2.Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 11.750.000	APBD
1.3.Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 9.553.000	APBD
1.4.Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 397.517.662	APBD
1.5.Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 6.707.000	APBD
1.6.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 78.550.000	APBD
2. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 82.700.000	APBD
2.1.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 6.700.000	APBD
2.2.Penyediaan Jasa Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 76.000.000	APBD
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 22.500.000	APBD
3.1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 22.500.000	APBD
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 318.570.000	APBD
4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 255.000.000	APBD
4.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 3.570.000	APBD
4.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 60.000.000	APBD

PIHAK KEDUA

OMAR UDAYA,S.STP.,M.SI
Pembina Tk. I
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA

MUHAMAD SOLEH WIBOWO, S.E
Penata Tk. I
NIP. 19810520 201101 1 002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI KUSYONO, S.E., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : OMAR UDAYA, S.STP., M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

OMAR UDAYA, S.STP., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA

ARI KUSYONO, S.E., M.Si
Pembina
NIP. 197111091996031003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR		TARGET	FORMULASI
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya kinerja pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	1.	Presentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Perangkat Daerah	100 %	Formulasi : Rata-rata Presentase Capaian Kinerja Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Sekretariat
		2.	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3.51	Formulasi : Rata-rata Presentase Capaian Kinerja Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan Survey kepuasan Masyarakat
		3.	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	88.5	Formulasi : : Rata-rata capaian nilai komponen penilaian SAKIP Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : LHE SAKIP
		4.	Nilai SPIP Perangkat Daerah	3.5	Formulasi : Rata-rata capaian nilai komponen penilaian SPIP Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : LHE SPIP

No.	PROGRAM	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 16.412.792.978	APBD
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 19.943.870	APBD
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.118.653.406	APBD
1.3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 930.140.482	APBD
1.4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 490.139.500	APBD
1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 4.717.545.720	APBD
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 1.136.370.000	APBD



PIHAK KEDUA

OMAR UDAYA,S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA



ARI KUSYONO,S.E.,M.Si
Pembina
NIP. 19720421 19920 3 1005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RR. NIKE ANDRIYANI LESTARI,S.H.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ARI KUSYONO,S.E.,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, September 2025

PIHAK KEDUA

ARI KUSYONO,S.E.,M.Si

Pembina

NIP. 197111091996031003

PIHAK PERTAMA

RR. NIKE ANDRIYANI LESTARI,S.H.

Penata Tk. I

NIP. 197010081990032006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Hasil Pengadan Barang
1.1	Tersedianya Mebel	1. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	Formulasi : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Pengadaan Mebel
1.2	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Formulasi : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	Formulasi : Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Pengadaan Sarana dan Prasarana
2.	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Pemeliharaan Barang

2.1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	1.	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	42 Unit	Formulasi : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
2.2	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	Formulasi : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.3	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Formulasi : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Formulasi : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Administrasi Umum

3.1	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1.	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ bangunan
3.2	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3.3	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1.	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1.	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.5	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	1.	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	Formulasi : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.6	Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Paket	Formulasi : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

3.7	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Tipe Perhitungan : Progres Positif Sumber Data : Arsip SKPD
4.	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Penyediaan Jasa
4.1	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	65 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.2	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
4.3	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	96 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 490.139.500	APBD
1.1	Pengadaan Mebel	Rp 133.500.000	APBD
1.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 136.585.000	APBD
1.3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 220.054.500	APBD
2.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 1.136.370.000	APBD
2.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 297.200.000	APBD
2.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp 63.190.000	APBD
2.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Rp 556.780.000	APBD
2.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Rp 209.200.000	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 930.140.482	APBD
3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 15.404.500	APBD
3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 126.525.500	APBD
3.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp 48.019.992	APBD
3.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 360.969.000	APBD
3.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 23.427.425	APBD
3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 343.233.065	APBD
3.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 12.561.000	APBD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 4.717.545.720	APBD
4.1	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 587.800.000	APBD
4.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp 4.109.745.720	APBD
4.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 20.000.000	APBD

PIHAK KEDUA



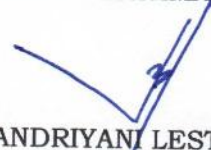
ARI KUSYONO, S.E., M.Si

Pembina

NIP. 197111091996031003

Purwokerto, 11 September 2025

PIHAK PERTAMA



RR. NIKE ANDRIYANI LESTARI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 197010081990032006



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUKI LESTARI WAHYUNINGTYAS, S.H
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ARI KUSYONO, S.E., M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 11 September 2025

PIHAK KEDUA

ARI KUSYONO, S.E., M.Si

Pembina

NIP. 197111091996031003

PIHAK PERTAMA

NUKI LESTARI WAHYUNINGTYAS, S.H

Penata Tk.I

NIP. 197712162010012002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN
DINAS PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	3 Dok	Formulasi : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Dokumen Perencanaan
1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	Formulasi : Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data: Dokumen Perencanaan
1.2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	Formulasi : Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : LKJiP Dinas Perhubungan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 19.943.870	APBD
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 18.143.870	APBD
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 1.800.000	APBD

Purwokerto, 11 September 2025

PIHAK KEDUA

ARI KUSYONO,S.E.,M.Si

Pembina

NIP. 197111091996031003

PIHAK PERTAMA

NUKI LESTARI WAHYUNINGTYAS, S.H

Penata Tk. I

NIP. 197712162010012002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN ARUM PERDANA,A.Ma.PKB.,S.H.
Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ARI KUSYONO,S.E.,M.Si
Jabatan : SEKRETARIS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, Oktober 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

ARI KUSYONO,S.E.,M.Si

DIAN ARUM PERDANA,A.Ma.PKB.,S.H.

Pembina

Penata Muda Tk.I

NIP. 197111091996031003

NIP. 199009152011012001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DINAS PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	4 Laporan	Formulasi : Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Administrasi Keuangan
1.1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	65 Orang/Bulan	Formulasi : Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.2	Terlaksananya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Kegiatan Administrasi Keuangan

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 9.118.653.406	APBD
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 8.841.663.406	APBD
1.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 276.990.000	APBD

Purwokerto, Oktober 2025

PIHAK KEDUA

ARI KUSYONO,S.E.,M.Si
Pembina
NIP. 197111091996031003

PIHAK PERTAMA

DIAN ARUM PERDANA,A.Ma.PKB.,S.H.
Penata Muda Tk. I
NIP. 199009152011012001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RETNO YULIASTUTI,S.Pd
Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : OMAR UDAYA,S.STP.,M.SI
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

OMAR UDAYA,S.STP.,M.SI
Pembina Tk.I
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA

RETNO YULIASTUTI,S.Pd
Penata Tk.I
NIP. 19770728 200801 2 026



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. MargantaraTanjung No. 460 Purwokerto KodePos 53134

Telp.(0281) 637211 Fax. (0281) 637211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BIDANG PRASARANA DINAS PERHUBUNGAN

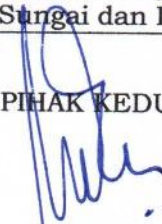
NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas	1. Presentase ketersediaan perlengkapan jalan	38.6 %	Formulasi : Jumlah Eksisting Prasarana Jalan (APJ dan Halte) dibagi Jumlah Kebutuhan Prasarana Jalan (APJ dan Halte) x 100 % Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Database Prasaranan Jalan
		2. Presentase Terminal yang Beroperasi Sesuai Ketentuan	87.5 %	Formulasi : Jumlah Terminal yang Beroperasi dibagi total Jumlah Terminal yang ada dikali 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Database Terminal
2.	Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran	1. Persentase Wilayah yang Terhubung Angkutan Sungai	75 %	Formulasi : Jumlah Trayek yang Terlayani Angkutan Sungai dibagi Jumlah Kebutuhan Trayek dikali 100 % Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Database Dermaga/ Pelabuhan Sungai
		2. Persentase prasarana angkutan sungai	66.6 %	Formulasi : Jumlah Dermaga yang terbangun dibagi jumlah dermaga yang dibutuhkan dikali 100 % Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Database trayek angkutan Sungai

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 12.902.670.755	APBD, BANTUAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
1.1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 12.163.964.255	APBD, BANTUAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
1.2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp 738.706.500	APBD
2. Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 150.000.000	APBD
2.1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp 150.000.000	APBD

Purwokerto, November 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


OMAR UDAYA,S.STP.,M.SI
Pembina Tk.I
NIP. 19770104 199603 1 002


RETNO YULIASTUTI,S.Pd
Penata Tk.I
NIP. 19770728 200801 2 026



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD EKA NUGRAHA,A.Md.L.L.A.J
Jabatan : Plt. KEPALA SEKSI TERMINAL

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : RETNO YULIASTUTI,S.Pd
Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, Oktober 2025

PIHAK KEDUA

RETNO YULIASTUTI,S.Pd

Penata Tk.I

NIP. 19770728 200801 2 026

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD EKA NUGRAHA,A.Md.L.L.A.J

Penata Tk.I

NIP. 19770302 200012 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI TERMINAL DINAS PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1. Jumlah Terminal Tipe C yang Dikelola dan Beroperasi	Formulasi : Jumlah Terminal Tipe C yang Dikelola dan Beroperasi Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : SK Terminal	7 Unit
1.1	Terlaksananya Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	1. Jumlah Terminal Tipe C yang Terbangun yang Dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Formulasi : Jumlah Terminal Tipe C yang Terbangun yang Dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : SK Terminal	1 Unit
1.2	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	2. Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Formulasi : Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Terehabilitasi dan Terpelihara Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Laporan Pemeliharaan Terminal	7 Unit

Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rp 738.706.500	APBD
1.1 Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Rp 250.000.000	APBD
1.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Rp 488.706.500	APBD

Purwokerto, Oktober 2025

PIHAK KEDUA

RETNO YULASTUTI,S.Pd

Penata Tk. I

NIP. 19770728 200801 2 026

PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD EKA NUGRAHA,A.Md.L.L.A.J

Penata Tk.I

NIP. 19770302 200012 1 002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OKTAVIA YULIANTO,SE
Jabatan : Plt. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : RETNO YULIASTUTI,S.Pd.
Jabatan : KEPALA BIDANG PRASARANA

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, Oktober 2025

PIHAK KEDUA

RETNO YULIASTUTI,S.Pd.
Penata Tk. I
NIP. 197707282008012026

PIHAK PERTAMA

OKTAVIA YULIANTO,SE
Penata Tk. I
NIP. 19811020 201101 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. MargantaraTanjung No. 460 Purwokerto KodePos 53134

Telp.(0281) 637211 Fax. (0281) 637211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN PRASARANA
DINAS PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
1.	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	1973 Unit	Formulasi : Jumlah Prasarana Jalan dalam Kondisi Baik Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Database Prasarana Jalan
1.1	Terlaksananya Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	400 Unit	Formulasi : Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Laporan Pengadaan Prasaraba Jalan
1.2	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1. Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1573 Unit	Formulasi : Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Tipe perhitungan : Kumulatif Sumber data : Laporan Pemeliharaan Prasaraba Jalan
2.	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Jumlah Prasarana Sungai dalam Kondisi Baik	2 unit	Formulasi : Jumlah Prasarana Sungai dalam Kondisi Baik Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Pemeliharaan Dermaga/Halte Sungai
2.1	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	1. Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	2 Unit	Formulasi : Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara Tipe Perhitungan : Kumulatif Sumber Data : Laporan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai

Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Rp 12.163.964.255	APBD, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
1.1 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten / Kota	Rp 6.314.335.005	APBD
1.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Rp 5.849.629.250	APBD, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
2. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp 150.000.000	APBD
2.1 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Rp 150.000.000	APBD

Purwokerto, Oktober 2025

PIHAK KEDUA



RETNO YULIASTUTI,S.Pd.
 Penata Tk. I
 NIP. 197707282008012026

PIHAK PERTAMA



OKTAVIA YULIANTO,SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19811020 201101 1 008



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWAN YULIANTO, S.S, M.A.P
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN PERPARKIRAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : OMAR UDAYA, S.STP, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

OMAR UDAYA, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA

IWAN YULIANTO, S.S, M.A.P
Pembina

NIP. 197407212003121008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas	1. Persentase pelaksanaan Manajamen rekayasa lalu lintas	100%	<i>Formulasi : Jumlah Kegiatan Pengendalian Operasional dan Penyelenggaraan Perparkiran yang terlaksana dibagi Target Kegiatan Pengendalian Operasional dan Penyelenggaraan Perparkiran x 100%</i> <i>Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</i> <i>Sumber Data : Laporan Kegiatan P5LL dan Perparkiran</i>

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 967.230.000	APBD
1.1.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp 275.145.000	APBD
1.2.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Rp 692.085.000	APBD

PIHAK KEDUA


OMAR UDAYA,S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA


IWAN YULIANTO,S.S,M.A.P
Pembina
NIP. 197407212003121008



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FADHIL JAMALUDIN NUR ROZAQ,S.STP.,M.A.P
Jabatan : KEPALA SEKSI PERPARKIRAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : IWAN YULIANTO,SS.,M.A.P
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN PERPARKIRAN

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 11 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA


IWAN YULIANTO,SS,M.A.P
Pembina
NIP. 197407212003121008


FADHIL JAMALUDIN NUR ROZAQ,S.STP.,M.A.P
Penata Muda Tk.I
NIP. 199511292017081002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**KEPALA SEKSI PERPARKIRAN
DINAS PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	PENJELASAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1. Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Diterbitkan	51 Dokumen	Formulasi : Jumlah Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir yang Diterbitkan Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Database Penyelenggaraan Perparkiran
1.1	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan dan terbangunnya fasilitas parkir kewenangan kabupaten/ kota Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Data MOU Perparkiran

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Rp 275.145.000	APBD
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	Rp 275.145.000	APBD

Purwokerto, September 2025

PIHAK KEDUA

IWAN YULIANTO,SS,M.A.P
Pembina

NIP. 197407212003121008

PIHAK PERTAMA

FADHIL JAMALUDIN NUR ROZAQ,S.STP.,M.A.P
Penata Muda Tk.I

NIP. 199511292017081002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TOMI LUQMAN HAKIM, S.STP., M.A.P
Jabatan : KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : IWAN YULIANTO, SS, M.A.P
Jabatan : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL DAN PERPARKIRAN

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

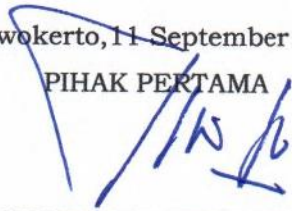
PIHAK KEDUA


IWAN YULIANTO, SS, M.A.P
Pembina

NIP. 197407212003121008

Purwokerto, 11 September 2025

PIHAK PERTAMA


TOMI LUQMAN HAKIM, S.STP., M.A.P
Penata

NIP. 199602132017081002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN OPERASIONAL
DINAS PERHUBUNGAN

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	1 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Laporan Pelaksanaan Kegiatan MRLl
1.1	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	35 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Laporan Kegiatan P5LL

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelaksanaan manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 692.085.000	APBD
1.1	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Rp 692.085.000	APBD

Purwokerto, 11 September 2025

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

IWAN YULIANTO,SS,M.A.P
Pembina

TOMI LUQMAN HAKIM,S.STP,M.A.P
Penata

NIP. 197407212003121008

NIP. 199602132017081002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF AKHMADI,S.SiT.
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : OMAR UDAYA,S.STP.,M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA

OMAR UDAYA,S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA



ARIF AKHMADI,S.SiT.
Pembina
NIP. 19780605 200012 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BIDANG LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR		TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Banyumas	1.	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan	4,1 %	Formulasi : Jumlah Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas, RPPJ, dll) yang Tersedia dibagi Jumlah Perlengkapan Jalan (Rambu Lalu Lintas, RPPJ, dll) yang dibutuhkan dikali 100 % Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Database Perlengkapan Jalan
		2.	Prosentase Pelaksanaan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	100%	Formulasi: Jumlah Kegiatan dan Dokumen MRLL yang Terlaksana dibagi Target Kegiatan dan Dokumen MRLL x 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan Kegiatan MRLL

Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 28.683.537.817	APBD, PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN
1.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Rp 27.026.680.192	APBD, PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN
1.2 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 1.656.857.625	APBD

PIHAK KEDUA

OMAR UDAYA,S.STP.,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA

ARIF AKHMADI,S.SiT.
Pembina
NIP. 19780605 200012 1 005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI HARSONO, S.T., M.Sc.
Jabatan : KEPALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ARIF AKHMADI, S.SiT.
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 11 September 2025

PIHAK KEDUA

ARIF AKHMADI, S.SiT.

Pembina

NIP. 19780605 200012 1 005

PIHAK PERTAMA

TRI HARSONO, S.T., M.Sc.

Pembina

NIP. 19840513 200912 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. MargantaraTanjung No. 460 Purwokerto KodePos 53134
Telp.(0281) 637211 Fax. (0281) 637211

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**KEPALA SEKSI REKAYASA LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN**

No.	SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Prasarana dan perlengkapan jalan dalam kondisi baik	147 Unit	<i>Formulasi : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik Tipe perhitungan : Kumulatif Sumber data : Database Perlengkapan Jalan</i>
1.1	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	102 Unit	<i>Formulasi : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Laporan Pengadaan Perlengkapann Jalan</i>
1.2	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	1. Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	45 Unit	<i>Formulasi : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Laporan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan</i>

Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten/ Kota	Rp 27.026.680.192	APBD, PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN
1.1 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Rp 1.434.839.000	APBD
1.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Rp 25.591.841.192	APBD, PBJT-KONSUMSI TENAGA LISTRIK DARI SUMBER LAIN

Purwokerto,11 September 2025

PIHAK KEDUA

ARIF AKHMADI,S.SiT.
Pembina
NIP. 19780605 20001 2 1005

PIHAK PERTAMA

TRI HARSONO, S.T., M.Sc
Pembina
NIP. 19840513 200912 1 005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. EKA NUGRAHA,A.Md.,LLAJ
Jabatan : KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : ARIF AKHMADI,S.SIT
Jabatan : KEPALA BIDANG LALU LINTAS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purwokerto, 11 September 2025

PIHAK KEDUA

ARIF AKHMADI,S.SIT
Pembina

NIP. 197806052000121005

PIHAK PERTAMA

M. EKA NUGRAHA,A.Md.,LLAJ
Penata Tk.I

NIP. 19770302 200012 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN

No.	SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten	1 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Laporan Kegiatan MRL
		2. Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Terpasang	18 Unit	Formulasi : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Terpasang Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Laporan Pengadaan ATCS
1.1	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten kota	4 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Provinsi Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Laporan Kegiatan MRL
1.2	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1. Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	12 Dokumen	Formulasi : Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Laporan Pengadaan ATCS

Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Rp 1.656.857.625	APBD
1.1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten / Kota	Rp 168.100.000	APBD
1.2 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Rp 1.488.757.625	APBD

PIHAK KEDUA

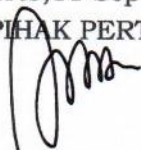


ARIF AKHMADI,S.SIT
Pembina

NIP. 197806052000121005

Purwokerto,11 September 2025

PIHAK PERTAMA



M. EKA NUGRAHA,A.Md.,LLAJ
Penata Tk.I

NIP. 197703022000121002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUFTI HAKIM,SH
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN KESELAMATAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : OMAR UDAYA,S.STP.,M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

OMAR UDAYA,S.STP.,M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA

MUFTI HAKIM,SH

Penata Tk.I

NIP. 19690406 199002 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN KESELAMATAN
DINAS PERHUBUNGAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas	1. Presentase Wilayah yang Terhubung Angkutan Jalan	100 %	Formulasi : Jumlah Kecamatan yang Terlayani Angkutan Jalan dibagi Jumlah Seluruh Kecamatan Kabupaten dikali 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Database Trayek dan Angkutan Umum
		2. Persentase pelaksanaan Manajamen rekayasa lalu lintas	100%	Formulasi : Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dibagi Target Kegiatan x 100% Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Laporan Sosialisasi MRL
		3. Prosentase Kendaraan yang Melakukan Uji Laik	94 %	Formulasi: Jumlah kendaraan yang melakukan uji laik dibagi Jumlah Kendaraan KBWU dikali 100 % Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Data Kendaraan yang Melakukan Uji Laik

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 155.080.000	APBD
1.1.	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 24.500.000	APBD
1.2.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 500.000	APBD
1.3.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 89.455.000	APBD
1.4.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp 5.000.000	APBD
1.5.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 35.625.000	APBD

PIHAK KEDUA

OMAR UDAYA,S.STP.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770104 199603 1 002

Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA

MUFTI HAKIM,SH
Penata Tk.I
NIP. 19690406 199002 1 002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TRI HARSONO, S.T., M.Sc
Jabatan : Plt. KEPALA SEKSI KESELAMATAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : MUFTI HAKIM, S.H.
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN KESELAMATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

MUFTI HAKIM, S.H.
Penata Tk.I

NIP. 196904061990021002

Purwokerto, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA

TRI HARSONO, S.T., M.Sc
Pembina

NIP. 19840513 200912 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. MargantaraTanjung No. 460 Purwokerto KodePos 53134

Telp.(0281) 637211 Fax. (0281) 637211

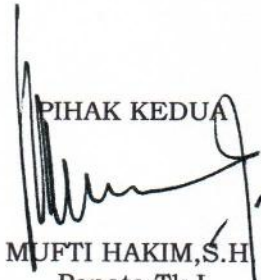
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI KESELAMATAN
DINAS PERHUBUNGAN

No.	SASARAN KEGIATAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten Kota	1 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Laporan Pelaksanaan Sosialisasi MRL
1.1	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1. Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Bidang Angkutan dan Keselamatan
2.	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1. Jumlah Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Laporan Audit dan Inspeksi Keselamatan Jalan
2.1	Terlaksananya Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1. Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12 Laporan	Formulasi : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Bidang Dalops dan Perparkiran

3.1	Terlaksananya Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1421 Dokumen	Formulasi : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Bidang Keselamatan
-----	---	----	---	--------------	---

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 89.455.000	APBD
1.1	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Rp 89.455.000	APBD
2.	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp 5.000.000	APBD
2.1	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Rp 5.000.000	APBD
3.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 35.625.000	APBD
3.1	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 35.625.000	APBD



PIHAK KEDUA

MUFTI HAKIM, S.H

Penata Tk.I

NIP. 19690406 199002 1 002

Purwokerto, Oktober 2025

PIHAK PERTAMA



TRI HARSONO, S.T., M.Sc

Pembina

NIP. 19840513 200912 1 005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUMAS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OKTAVIA YULIANTO, S.E
Jabatan : KEPALA SEKSI ANGKUTAN

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : MUFTI HAKIM,SH
Jabatan : KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN KESELAMATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

MUFTI HAKIM,SH
Penata Tk.I

NIP. 19690406 199002 1 002

Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA

OKTAVIA YULIANTO, S.E
Penata Tk.I

NIP. 198110202011011008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

**KEPALA SEKSI ANGKUTAN
DINAS PERHUBUNGAN**

NO	SASARAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah angkutan umum yang beroperasi	92 Unit	<i>Formulasi : Jumlah angkutan umum yang beroperasi Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Database Angkutan Umum</i>
1.1	Terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	1. Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang Antar Kota dalam 1 Satu Daerah Kabupaten Kota yang Tersedia	97 Unit	<i>Formulasi : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang tersedia Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Database Angkutan Umum</i>
2.	Terbitnya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1. Jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	10 Dokumen	<i>Formulasi : Jumlah Dokumen Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Jumlah Laporan Pengajuan Ijin Trayek Angkutan Umum</i>
2.1	Terfasilitasinya pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1. Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Laporan	<i>Formulasi : Jumlah Laporan pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Tipe perhitungan : kumulatif Sumber data : Jumlah Laporan Pengajuan Ijin Trayek Angkutan Umum</i>

No.	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 24.500.000	APBD
1.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Rp 24.500.000	APBD
2.	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp 500.000	APBD
2.1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp 500.000	APBD

PIHAK KEDUA



MUFTI HAKIM,SH

Penata Tk.I

NIP. 19690406 199002 1 002

Purwokerto, November 2025

PIHAK PERTAMA



OKTAVIA YULIANTO, S.E

Penata Tk. I

NIP. 19811020 201101 1 008